



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dibentuk dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan Permendagri No. 56 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2016-2021

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) seperti yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel. 1.2. Perubahan Perda No. 15 Tahun 2008
menjadi Perda No. 10 Tahun 2011**

Perda No. 11 Tahun 2011	Perbup No.42 Tahun 2016
Kepala Badan	Kepala Badan
Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Penyusunan Program.	Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan; 2) Sub Bagian Kepegawaian; 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
Bidang-Bidang, terdiri dari :	
1. Bidang Pemerintahan dan Hukum, membawahkan : a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; b). Sub Bidang Hukum, Politik dan HAM	1. Bidang Pemerintahan Daerah, membawahkan : a). Sub Bidang Kelembagaan; b). Sub Bidang Aparatur c). Sub Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan, membawahkan : a) Sub Bidang Perekonomian dan Dunia Usaha; b) Sub Bidang Keuangan Daerah	2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, membawahkan : a) Sub Bidang Ekonomi Daerah; b) Sub Bidang Keuangan Dan Aset Daerah c) Sub Bidang Pembangunan Daerah.
3. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, membawahkan : a) Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup;	3. Bidang Inovasi Daerah, membawahkan : a) Sub Bidang Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah; b) Sub Bidang Pengembangan Ilmu



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2016-2021

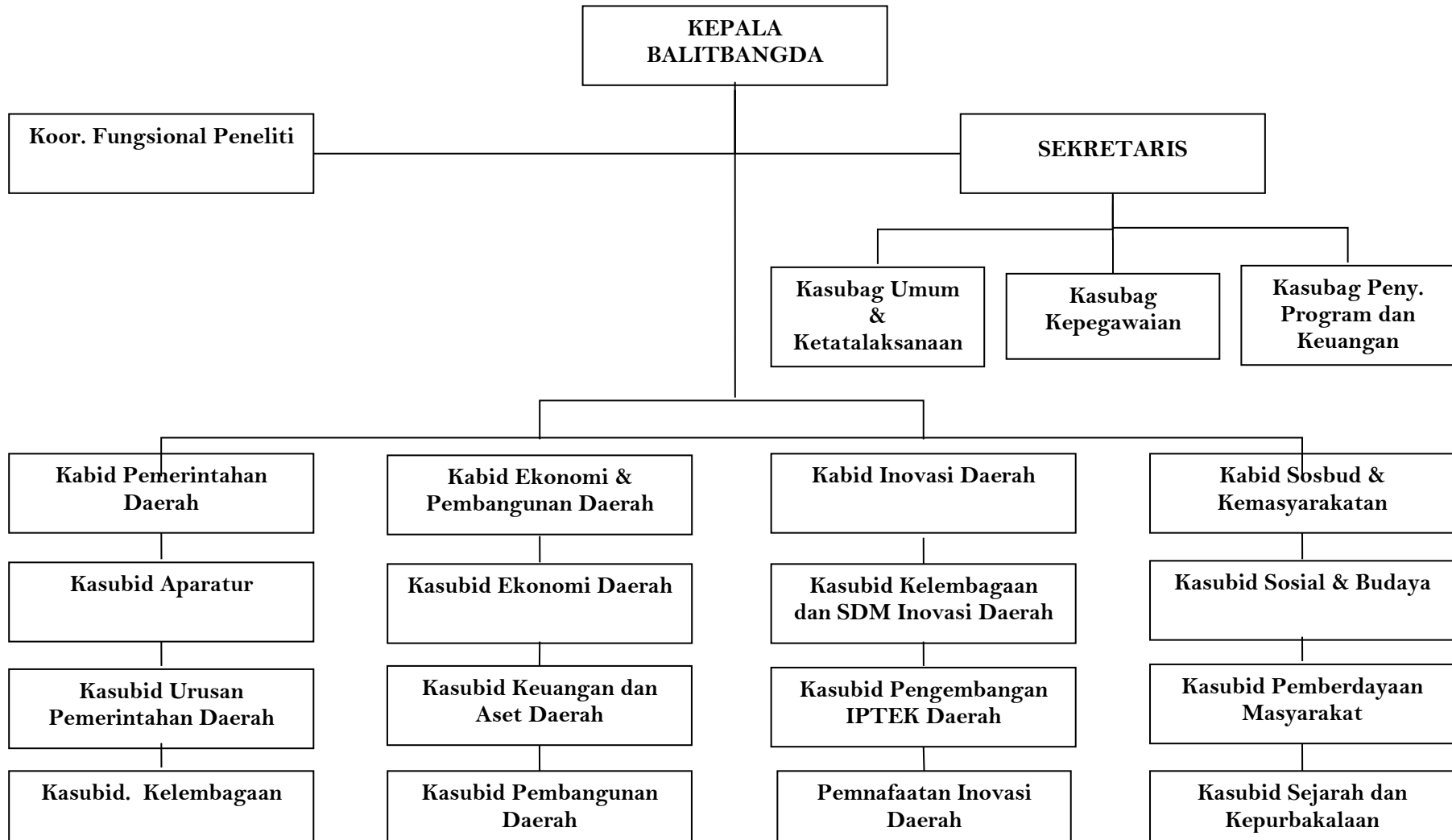
b) Sub Bidang Informasi dan Teknologi.	Pengetahuan dan Teknologi Daerah c) Sub Bidang Pemanfaatan Inovasi Daerah.
4. Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, membawahkan : a) Sub Bidang Sosial Budaya; b) Sub Bidang Kemasyarakatan.	4. Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, membawahkan : a) Sub Bidang Sosial Budaya; b) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat. c) Sub Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.	6. Kelompok Jabatan Fungsional.
	7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2016-2021

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Balitbangda Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2011



2.2. Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi. Oleh karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 83 Pegawai, yang dirinci menurut status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SLTA	22	26,51
2.	D.III	1	1,20
3.	S1	37	44,58
4.	S2	20	24,10
5.	S3	3	3,61
	TOTAL	83	100

Sumber Data : Subbagian Kepegawaian, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar, Tahun 2017

Gambaran tentang pendidikan pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah seperti yang terdapat pada tabel di atas memperlihatkan bahwa masih terdapat 22 pegawai yang berpendidikan SLTA atau sekitar 26,51 persen dari seluruh jumlah pegawai yang ada. Adapun pegawai yang berpendidikan Diploma terdapat 1 pegawai atau sekitar 1,20 persen dari seluruh pegawai yang ada. Jumlah persentase terbesar adalah pegawai yang berpendidikan S1 yaitu sebesar 44,58 persen, kemudian disusul pegawai yang berpendidikan S2 sebesar 24,10 persen, dan yang terakhir S3 sebesar 3,61 persen.

Kesadaran dan upaya pegawai serta komitmen organisasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang dimilikinya merupakan modal bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk meningkatkan kinerja. Hal ini sejalan dengan perubahan struktur kelembagaan yang sangat menuntut produktifitas



dan daya saing yang tinggi sehingga dapat menunjang kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke depan.

Sumber daya lainnya yang tidak kalah penting dibandingkan sumber daya manusia adalah sarana dan prasarana, yang merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kegunaan sarana dan prasarana ini antara lain untuk: (1) Menunjang kegiatan ketatausahaan/ administrasi perkantoran; (2) Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparatur; serta, (3) Menunjang kegiatan Penelitian dan Pengembangan; (4) Menunjang kegiatan diseminasi hasil litbang; dan lain-lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam dokumen rencana strategis Balitbangda Kukar 2016 – 2021 terdapat sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Selama kurun waktu 2016 – 2018, Sasaran-sasaran yang telah dicapai sebagaimana tergambar pada Tabel T 2.3 sebagai berikut :



Tabel T-.23.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten KutaiKartanegara**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Ket :

- 1) Kolom (6) sampai dengan kolom (20) diisi data tahun 2013 s.d. 2017 (Target, Realisasi dan Rasio Capaian)

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2016-2021

berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2016-2021

T
a
b
e
l

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

T
-
C
.
2
4
.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
KutaiKartanegara



- *) diisi dengan nama Perangkat Daerah
- ***) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- ***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah (Per Program)
 - Realisasi Anggaran tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terhadap Rencana APBD.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar 2016 – 2021 terdapat sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Sasaran-sasaran tersebut diidentifikasi dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan selama tahun 2016 – 2021, sebagaimana tergambar pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran yang ingin Dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Periode Renstra 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Melaksanakan pengelolaan sumber daya internal untuk mendukung tupoksi institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit/satuan kerja	



Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai bagi pelaksanaan kerja organisasi• Terpeliharanya sarana prasarana organisasi
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhinya kebutuhan tenaga jabatan fungsional peneliti yang memadai• Meningkatnya kapasitas keilmuan dan kompetensi pegawai melalui program pelatihan dan pengembangan pegawai
Meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya pelayanan keuangan yang lebih cepat dan akurat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel
Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal secara optimal	<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya koordinasi internal dan lintas lembaga yang efektif
Misi 2 : Melaksanakan riset dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan Daerah	
Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Kelembagaan sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Kelembagaan daerah
Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan daerah
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Aparatur	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Aparatur sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi



	kebijakan di bidang Aparatur Daerah
Misi 3 : Melaksanakan riset dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang <i>Ekonomi dan Pembangunan Daerah</i>	
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi Daerah
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Keuangan dan Aset Daerah sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Keuangan dan Aset Daerah
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan daerah sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan daerah
Misi 4 : Melaksanakan riset dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang <i>Inovasi Daerah</i>	
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Kelembagaan dan SDM Inovasi sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan



	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Pemanfaatan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Pemanfaatan Inovasi sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Pemanfaatan Inovasi Daerah
Misi 5 : Melaksanakan riset dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang <i>Sosial Budaya dan Kemasyarakatan</i>	
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Sosial Budaya sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Sosial Budaya oleh Pemerintah Daerah
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah
Menghasilkan rekomendasi dan desain kebijakan yang berkualitas di bidang Sejarah dan Kepurbakalaan	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai kebutuhan daerah• Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang Sejarah dan Kepurbakalaan oleh Pemerintah Daerah.
Misi 6 : Menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data, informasi serta publikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset dan perumusan kebijakan daerah	
Menyediakan informasi dalam bentuk <i>data base</i> potensi daerah	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya <i>data base</i> daerah
Menghasilkan publikasi mandiri dan	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya publikasi mandiri dan



berkala sebagai bahan pendukung riset atau referensi perumusan kebijakan	berkala sebagai bahan pendukung riset atau referensi perumusan kebijakan
--	--

Sumber : Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Dalam upaya pencapaian masing-masing sasaran yang telah diurai diatas, jika dilihat keterkaitan antara sasaran dengan program dimungkinkan satu sasaran memiliki program yang juga merupakan program dari sasaran lainnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk satu sasaran kemungkinan akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran yang lain.

Bentuk-bentuk kontribusi utama yang dihasilkan dari berbagai perwujudan sasaran terhadap pencapaian tujuan melalui pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan ke dalam program-program sebagai berikut :

1. **Program Penelitian Umum.** Kontribusi utama yang telah diperoleh dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan dari program ini adalah berbagai rekomendasi kebijakan sesuai kebutuhan daerah di bidang Kelembagaan Daerah, Bidang Pemerintahan Daerah, Bidang Aparatur Daerah, Bidang Sosial Budaya, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, Bidang Ekonomi Daerah, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Pembangunan Daerah, Bidang Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah, Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Pemanfaatan Inovasi Daerah.
2. **Program Inovasi Daerah.** Kontribusi utama yang telah diperoleh dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan dari program ini adalah peningkatan Inovasi Untuk Pembangunan Daerah.
3. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.** Kontribusi utama yang telah diperoleh dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan dari program ini adalah tersedianya berbagai kegiatan pelayanan penunjang administrasi perkantoran seperti penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, bahan logistik kantor, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan kantor, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, jasa administrasi teknis perkantoran, penunjang kegiatan olah raga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Rapat Koordinasi Penelitian dan



Pengembangan (Rakor Litbang) Kabupaten Kutai Kartanegara antar dinas dan kecamatan, jasa tenaga pendukung non PNS, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, pengelolaan website Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebagainya.

4. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.** Kontribusi utama yang telah diperoleh dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan dari program ini adalah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya serta pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
5. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.** Kontribusi utama yang telah diperoleh dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan dari program ini adalah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan peralatan gedung kantor, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, pembangunan pagar kantor, gedung perpustakaan dan pendopo mini, serta sarpras olahraga, pengadaan buku-buku literatur dan pengelolaan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebagainya.
6. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.** Kontribusi utama yang telah diperoleh dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan dari program ini adalah peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bimbingan teknis analisis data dengan sistem SPSS, diklat operator komputer dan bahasa Inggris, bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Keppres 80 Tahun Anggaran 2003 dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, diklat metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, penunjang kegiatan olahraga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, pelaksanaan *Focus Group Discussion* tentang Isu Aktual di Kabupaten Kutai Kartanegara, Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah se Kabupaten Kutai Kartanegara, Penguatan Kebijakan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.** Kontribusi utama yang telah diperoleh dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan dari program ini adalah penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2016-2021

Anggaran, dan penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, peningkatan pengelolaan inventarisasi asset di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, penyusunan TAPKIN dan LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2011- 2015 sebelumnya telah dapat terlaksana dengan baik, dengan tingkat pencapaian rata-rata yaitu 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus meningkat, apalagi jika dibandingkan dengan keterbatasan-keterbatasan yang masih ada. Selain ditinjau dari pencapaian sasaran rata-rata program dan kegiatan, perkembangan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, berbanding lurus dengan realisasi penyerapan anggaran yang mengalami peningkatan yang signifikan pula. Penyerapan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2015 jika dirata-ratakan, tiap tahunnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berhasil menyerap anggaran sebesar 92,66 persen dari total pagu yang dimilikinya. anggaran terbesar yang diperoleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp. 16.067.453.925,-. Sedangkan Realisasi penyerapan anggaran terbesar pada tahun 2014 sebesar 97,03% sedangkan terendah ditahun 2015 sebesar 82,84% yang disebabkan adanya Rasionalisasi Anggaran pada tahun tersebut. Perkembangan kinerja anggaran dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 - 2015

Tahun	Besaran Anggaran
-------	------------------



Anggaran	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
2011	12.075.884.655	11.247.636.268	93,14
2012	13.145.329.500	12.311.148.434	93,65
2013	16.067.453.925	15.528,363.153	96,64
2014	9.000.000.000	8..732.885.698	97.03
2015	7.075.362.862	5.861.367.417	82,84

Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2016

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam lima tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan dengan menempatkan Gerbang Raja Jilid II sebagai *grand strategy* pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih bersifat inklusif yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pemerintah Daerah yang handal, profesional dan mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, melalui Gerbang Raja penataan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga lebih dimatangkan.

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program Gerbang Raja Jilid II 2016-2021, dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dalam proses penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah diantaranya adalah :

1. *Good governance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan implementasikan kepada wujud pelaksanaan yang lebih nyata dan bertanggungjawab;
2. Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2016-2021 yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021;
3. Tuntutan *stakeholders* terhadap publikasi hasil Penelitian dan Pengembangan;
4. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal;



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2016-2021

5. Hasil-hasil / *outcome* penelitian yang belum diimplementasikan oleh OPD – OPD yang ada;
6. Belum tersedianya laboratorium Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Riset Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa yang sebagian besar belum memadai;
8. Mindset SDM aparatur yang belum seluruhnya berorientasi pada kelitbangan;

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan, antara lain yaitu:

1. Peningkatan SOTK dari pola minimal ke pola maksimal dengan penambahan 2 Kepala Bidang dan perubahan nomenklatur Sub Bidang pada masing-masing bidang, sehingga tugas dan fungsi dapat terbagi dan kejelasan masing-masing tugas pokok dan fungsi sangat nampak;
2. Beberapa program kegiatan yang telah direncanakan dalam 5 tahun kedepan sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik;
3. Beberapa program kegiatan yang baru sebagai tindak lanjut dari mengatasi kendala yang ada, disamping kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk menghantarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Dukungan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan pelaporan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
5. Jaringan networking kelitbangan yang terbangun cukup luas;
6. Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang Penelitian ;
7. Kepercayaan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Disamping tantangan dan Peluang tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga memiliki beberapa kelemahan yang dihadapi dalam Penelitian dan Pengembangan organisasi kedepan, antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan baik dari segi kuantitas, maupun kualitas;



2. Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti dan Perakayasa yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan Pejabat Struktural dan Fungsional Umum;
3. Kurangnya Pembinaan dan Peningkatan kapasitas sumber daya fungsional melalui pendidikan dan pelatihan substansi maupun keterampilan teknis yang dapat mendukung peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan masih belum prioritas sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas rekomendasi yang dihasilkan;
4. Belum Optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi/OPD lainnya, baik Litbang Pemerintah (Badan Litbang Kementerian, Badan Litbang Provinsi, Lembaga Litbang yang melekat di Perguruan Tinggi, Akademisi) maupun dengan Litbang swasta saat ini masih belum ada yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama Kelitbangan.
5. Anggaran yang masih kurang mendukung pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan serta beberapa kebijakan teknis terkait anggaran yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Sarana Laboratorium Kelitbangan masih belum tersedia dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;

Untuk menghadapi Tantangan dan Kelemahan selain memiliki peluang di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga memiliki beberapa Kekuatan untuk menghadapi Penelitian dan pengembangan organisasi kedepan, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/36/SJ Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah No.12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 14. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2016-2021

15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.